

SKRIPSI

ANALISA TINGKAT KEKUMUHAN
BERDASARKAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN CERENTI



Oleh:

Nisfu Nur Rahma Yani
NPM. 210205003

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

**ANALISA TINGKAT KEKUMUHAN
BERDASARKAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN CERENTI**

SKRIPSI



Oleh:

Nisfu Nur Rahma Yani

NPM. 210205003

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISA TINGKAT KECUMUHAN
BERDASARKAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN CERENTI

Disusun dan diajukan oleh :

NISFU NUR RAHMA YANI

210205003

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi

Pada Tanggal **15 Agustus 2025**

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Jabatan Dalam Seminar	Nama Dewan Seminar	Tanda Tangan
1	Ketua Sidang	Retni Pratiwi, S.E., M.M	
2	Pembimbing I	Dhina Yuliana, S.E., M.Si	
3	Pembimbing II	Agus Candra, S.T., M.Si	
4	Penguji Utama	Riki Ruspianda, S.P., M.Si	
5	Anggota Penguji	Ria Asmeri Jafra, S.T., M.T	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Teknik


Agus Candra ST. M.Si
NIDN. 1020088701

Ketua
Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota


Ria Asmeri Jafra, ST., MT
NIDN. 1027038402

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
ANALISA TINGKAT KECUMUHAN
BERDASARKAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN CERENTI

Disusun dan diajukan oleh :
NISFU NUR RAHMA YANI
210205003

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 08 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dhina Yuliana, SE., M.Si
NIDN. 1004078203


Agus Candra ST. M.Si
NIDN. 1020088701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Islam Kuantan Singingi


Ria Asmeri Jafra, ST., MT
NIDN. 1027038402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisfu Nur Rahma Yani

NPM. : 210205003

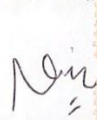
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisa Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan Di Kecamatan Cerenti adalah :

1. Karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Merupakan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.

Teluk Kuantan, 08 Agustus 2025




NISFU NUR RAHMA YANI
210205003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam prosesnya, banyak sekali rintangan dan hambatan. Penulis menyadari sepenuh hati bahwa terselesaikannya skripsi ini, semata-mata adalah karena pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan tatanan dan tuntunan sehingga kita dapat membedakan tuntunan dan tontonan.

Skripsi ini merupakan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan analisis kawasan kumuh Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis menyadari juga bahwa sebuah keberhasilan tidak terlepas dari campur tangan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis di berikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I Sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Agus Candra ST. M.Si Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II penulis

4. Ibu Ria Asmeri Jafra,ST,.MT sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak memberi motivasi selama menempuh studi di Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Dr. Dhina Yuliana SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak/Ibu perangkat desa dan masyarakat Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang dipimpin.
8. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua dan saudara/i kandung penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Terima kasih kepada segenap sahabat yang setia menemani, bekerjasama, dan memberi motivasi kepada penulis.

Akhirnya kepada mereka senantiasa penulis berharap semoga Allah SWT membalas budi baik tersebut dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Teluk Kuantan, 08 Agustus 2025

Nisfu Nur Rahmayani

ABSTRAK

Nisfu Nur Rahma Yani

Dhina Yuliana

Agus Candra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kekumuhan pada kawasan kumuh di Kecamatan Cerenti yaitu Kelurahan Pasar Cerenti dan Desa Koto Praku berdasarkan aspek jalan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Cakupan pelayanan jalan lingkungan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti sudah memadai terhadap luas area artinya sebagian besar lokasi sudah terlayani jalan lingkungan. Kondisi kualitas jalan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti secara keseluruhan sudah memadai, tinggal 25% jalan berkualitas buruk yang terdapat di Kelurahan Pasar Cerenti. Tingkat kekumuhan berdasarkan aspek jalan lingkungan, kawasan Kelurahan Pasar Cerenti berada pada tingkat kumuh rendah dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti sudah bukan kawasan kumuh.

Kata Kunci : Analisa, Kawasan Kumuh, Aspek Jalan Lingkungan.

ABSTRACT

Nisfu Nur Rahma Yani

Dhina Yuliana

Agus Candra

This study aims to determine the level of slum areas in Cerenti District, namely Pasar Cerenti Village and Koto Praku Village, based on the aspect of neighborhood roads. The research method used in this study is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the coverage of neighborhood roads in Pasar Cerenti Village and Koto Praku Village, Cerenti District, is adequate for the area, meaning that most locations are served by neighborhood roads. Overall, the quality of roads in Pasar Cerenti Village and Koto Praku Village, Cerenti District, is adequate, with only 25% of the roads in Pasar Cerenti Village being of poor quality. Based on the aspect of neighborhood roads, Pasar Cerenti Village is classified as a low slum, and Koto Praku Village, Cerenti District, is no longer a slum.

Keywords: Analysis, Slum Areas, Environmental Road Aspects.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Metode Penelitian.....	45
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Sumber Data	46
3.4 Variabel dan Indikator	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisa Data	50

3.7	Diagram Alir Penelitian.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
4.1	Sejarah Singkat Kecamatan Cerenti	Error! Bookmark not defined.
4.2	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		53
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		87
	Lampiran 1. Kuisioner Penelitian	87
	Lampiran 2. Surat Riset.....	89
	Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi	90
	Lampiran 4. Foto Dokumentasi Wawancara.....	91
	Lampiran 5. Foto Jalan Kelurahan Pasar Cerenti.....	95
	Lampiran 6. Jalan Desa Koto Praku.....	102
	Lampiran 7. Data Kelurahan Pasar Cerenti Dan Data Desa Koto Praku	105
	Lampiran 8. Biodata Penulis	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan.....	25
Tabel 2. 2 Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan.....	27
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3. 1 Matrik Penyusunan Skripsi.....	46
Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator Analisa Kawasan Kumuh.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Kawasan Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi 2020	3
Gambar 2. 1 Kebutuhan Data Numerik Kumuh.....	32
Gambar 2. 2 Data Isian Indikator Numerik Kekumuhan	36
Gambar 2. 3 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan ...	38
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Peta Citra Kelurahan Pasar Cerenti..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Peta Kabupaten Kuantan Singingi....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 Peta Kabupaten Kuantan Singingi....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Jalan Tanah Kelurahan Pasar Cerenti.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 6 Jalan Aspal Kelurahan Pasar Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 7 Pengukuran Jalan Lingkungan Kelurahan Pasar Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 8 Jalan Desa Koto Praku	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 9 Pengukuran Jalan Lingkungan Koto Praku....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 10 Jalan Lingkungan Kelurahan Pasar Cerenti .	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 11 Wawancara Camat Cerenti.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 12 Wawancara Lurah Pasar Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 13 Kondisi Jalan Rusak Lingkungan Kelurahan Pasar Cerenti...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 14 Wawancara Ketua RW 1 Kelurahan Pasar Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 15 Jalan Rusak Area Pasar Kelurahan Pasar Cerenti	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 16 Jalan Lingkungan Desa Koto Praku	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 17 Wawancara Camat Cerenti.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 18 Wawancara Kepala Desa Koto Praku	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 19 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Koto Praku	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian	87
Lampiran 2. Surat Riset.....	89
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi	90
Lampiran 4. Foto Dokumentasi Wawancara.....	91
Lampiran 5. Foto Jalan Kelurahan Pasar Cerenti.....	95
Lampiran 6. Jalan Desa Koto Praku.....	102
Lampiran 7. Data Kelurahan Pasar Cerenti Dan Data Desa Koto Praku	105
Lampiran 8. Biodata Penulis	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah kota-kota besar di Indonesia ditempati oleh permukiman tidak terencana yang salah satunya dinamakan kampung (Pigawati, 2015). Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk pola pendekatan yang bersifat holistic, perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan diantaranya adalah pemugaran, bantuan teknik, contoh perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi, penyediaan sarana MCK, bak sampah dan penyediaan air bersih (Pigawati, 2015). Program ini didukung konsep Dirgen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100-0-100 yang bertujuan penanganan kualitas permukiman air bersih dan permukiman kumuh sanitasi.

Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia, Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Menurut penelitian Zulfa, dkk (2023) menyatakan bahwa Sistem waris juga mempengaruhi cakupan pelayanan jalan dimana beberapa bangunan hanya dapat diakses melalui jalan setapak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sadyohutomo (2008), dimana perencanaan dan pembangunan prasarana (khususnya jalan) yang terlambat pada daerah perkembangan permukiman oleh pemerintah kota. Terlambatnya perencanaan di Kabupaten Bener Meriah diakibatkan oleh masyarakat yang memecah kavling secara swadaya, sehingga tidak terlayani.

Zulfa, dkk (2023) juga menjelaskan bahwa Buruknya kualitas permukaan jalan ditinjau dari jenis permukaan dan kerusakan yang terdapat pada permukaan jalan seperti retak dan perubahan bentuk. Kualitas permukaan jalan lingkungan mempengaruhi kenyamanan aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan kondisi topografi perbukitan, kondisi jalan yang rusak juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Ruas jalan yang tidak terdapat drainase juga mengalami kerusakan permukaan jalan akibat dari air hujan yang mengalir di badan jalan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar kualitas permukaan jalan di kawasan Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah mengalami perubahan bentuk/retak sehingga bila terjadi hujan keadaan jalan akan menjadi becek. Kondisi jalan yang rusak dipengaruhi oleh topografi perbukitan, kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi, ditambah dengan beberapa ruas jalan yang tidak memiliki drainase dan drainase yang rusak sehingga dapat menyebabkan erosi pada badan jalan. Hal ini dapat terlihat dari pengikisan pada permukaan jalan yang mulai mengalami perubahan bentuk dan mulai retak. Selain itu, kualitas konstruksi yang buruk karena

keterbatasan dana juga menjadi faktor pemicu kualitas jalan yang buruk pada lokasi penelitian.

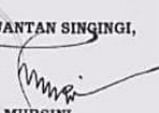
Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat banyak titik daerah yang termasuk sebagai kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kuantan Singingi Nomor kpts 78/11/2020 tanggal 3 Februari 2020, Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Data Kawasan Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi 2020

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi
 Nomor : Kpts. 78/11/2020
 Tanggal : 3 Februari 2020

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 Di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRASI		KEPENDUDUKAN (Jiwa)		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/DISTRIK	JUMLAH	NILAI	LINTANG	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
1	Kawasan Kota Taluk Kuantan (Kota Jahir)	119,10	Desa Koto Taluk, Beringin, Simpang Tiga, Desa Sawah II	Kuantan Tengah	10.994	< 150 jiwa/ha	0,533337	101.568297	46	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
2	Kawasan Pasar Taluk	11,47	Pasar Taluk	Kuantan Tengah	732	< 150 jiwa/ha	-0,53072	101.570617	21	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan I Sawah	11,30	Desa Sawah	Kuantan Tengah	837	< 150 jiwa/ha	-0,528955	101.576089	47	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
4	Kawasan Kuantan Mudik	23,79	Desa Banjar Padang, Pasar Lubuk Jambi	Kuantan Mudik	1.548	< 150 jiwa/ha	-0,659987	101.465724	50	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
5	Kawasan Kuantan Hilir I	40,31	Pasar Baru	Kuantan Hilir	1.562	< 150 jiwa/ha	-0,43569	101.729563	25	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
6	Kawasan Kuantan Hilir II	14,50	Pasar Uang	Kuantan Hilir	475	< 150 jiwa/ha	-0,436771	101.728264	33	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
7	Kawasan Cerenti	25,35	Koto Praku, Pasar Cerenti	Cerenti	1.277	< 150 jiwa/ha	-0,498555	101.668837	35	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
8	Kawasan Benai	50,06	Kelurahan Benai	Benai	863	< 150 jiwa/ha	-0,48574	101.523184	32	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
9	Kawasan Muara Lembu	169,45	Kelurahan Muara Lembu	Singingi	3.874	< 150 jiwa/ha	-0,465939	101.400601	37	Ringan	5	Tinggi	Legal	C1/3
Total		465,33	13 Kelurahan/Desa	6 Kecamatan	22.162									

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

 H. MURSINI

Sumber : Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025.

Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar sebagai Kecamatan yang memiliki kawasan

kumuh. Salah satu kecamatan yang tertera adalah Kecamatan Cerenti yang memiliki 2 (dua) titik desa yang menjadi kawasan kumuh di Kecamatan Cerenti yaitu Kelurahan Pasar Cerenti dan Koto Peraku.

Data Tersebut belum dilakukan Penelitian lanjutan, maka tidak ditemukan hasil data terbaru mengenai data kawasan kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dari itu penulis menggunakan data terakhir dibekukan yaitu data Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kuantan Singingi Nomor kpts 78/11/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Kelurahan Pasar Cerenti merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung dalam suasana terbuka. Meskipun pasar cerenti memiliki keunggulan dalam harga dan keragaman barang, dan pasar cerenti ini sudah terbentuk sangat lama namun karena banyaknya faktor penyebab yang membuat pasar cerenti perlu di lakukan tindakan seperti kebersihan , kemanaan, dan membuat tempat sosial yang lebih tertata.

Berdasarkan data dan latar belakang, maka penulis perlu mengangkat sebuah judul tentang **”Analisa Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan di Kecamatan Cerenti”**

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Kumuh Di Kecamatan Cerenti Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan?”

1.3 Tujuan Penelitian

“Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Di Kecamatan Cerenti Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan.”

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis penelitian maupun bagi para pembaca atau pihak lain yang berkepentingan.

1.4.1 Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya

Menambah ilmu pengetahuan dan khususnya untuk mendapatkan gelar serjana perencanaan wilayah dan kota (S.PWK) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan koleksi data serta referensi yang dapat digunakan pustaka bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintahan untuk mengetahui Tingkat Kekumuhan Pada Kawasan Di Kecamatan Cerenti Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kawasan

Menurut Eka Dahlan Uar (2016) Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional, kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, terdiri dari;

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain itu menurut Sitorus et al. (2020) dikenal kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan termasuk sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
2. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

3. Kawasan tertentu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangannya.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu dibedakan dalam tiga jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda:

1. Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan Tata Ruang untuk perkotaan metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Rencana Umum adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.
 - a. Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota
 - b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll). (Uu No 26 Tahun 2007 Rencana Tata Ruan Wilayah)

2.1.2 Pengertian Kawasan Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, definisi permukiman yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat 5, Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- b) Pasal 1 ayat 6, Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- c) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- d) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - i. bangunan gedung;
 - ii. jalan lingkungan;
 - iii. penyediaan air minum;
 - iv. drainase lingkungan;
 - v. pengelolaan air limbah;
 - vi. pengelolaan persampahan; dan vii. proteksi kebakaran.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain dibidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan yang menjadi kawasan kumuh. Kumuh sering diidentikan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan kota. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkatan kepadatan populasi tinggi disebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisi yang tidak Higienis (A. Harahap, 2019)

Menurut *CSU's Urban studies Department* tahun 1964, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sirkulasi, dan lapangan terbuka. Kondisi yang ada sering kali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.

Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis

timbul sebagai akibat dari ketidak mampuan daya lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung dikawasan tersebut, diwilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, di wilayah pedesaan dengan kepadatan yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan, Diberbagai kawasan kumuh, penduduk tinggal dikawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti mobil pemadam kebakaran, kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk, dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan kawasan kumuh terus meningkat, hal ini sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk. Pemerintah telah mencoba menangani masalah kawasan kumuh tersebut dengan berbagai cara yaitu memperbaiki sanitasi dan memperbaiki bak sampah (Sitorus et al., 2020).

Selain kawasan kumuh yang menepati lahan-lahan yang legal, yang disebut “*slum area*”. Kawasan kumuh juga sering muncul tanpa hak-hak yang jelas, baik secara status kepemilikan maupun secara fungsi ruang kota yang umumnya merupakan lahan yang bukan tempat hunian, tanpa seijin pemiliknya yang karenanya, pada umumnya membawa konsekuensi terhadap tidak layaknnya kondisi hunian masyarakat karena tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar bagi lingkungan huniannya (Wimardana, 2016).

Kawasan semacam ini menurut berbagai literatur termasuk kedalam kriteria kawasan squatter. *Squatter* adalah suatu area hunian yang dibangun diatas lahan

tanpa dilindungi hak atas kepemilikan atas tanahnya, dan masyarakat squatter adalah suatu masyarakat yang mendiami atau bertempat tinggal diatas lahan yang bukan haknya atau bukan diperuntukan bagi permukiman, seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokasi terlarang untuk di huni dan berkembang cepat sebagai hunian karena terlambat diantisipasi dan menempati lahan yang tidak sah (tanah negara). Kelompok *squatter* pada umumnya merupakan pendatang dari wilayah perdesaan atau wilayah pinggiran kota yang bermigrasi ke perkotaan untuk mengadu nasib (mencari nafka) diperkotaan, selain secara ekonomi umumnya mereka merupakan komunitas yang berpenghasilan rendah, bekerja disektor informal, dengan penghasilan yang tidak tetap juga secara sosial mereka berpendidikan rendah, berketerampilan terbatas dengan tatanan sosial kemasyarakatan yang longgar, menghadapi eksklusipisme dari masyarakat disekitarnya dan akses yang terbatas terhadap pelayanan sosial dan administrasi public (Wimardana, 2016).

Kemudian secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan dan kepastian terutama menyangkut lahan yang mereka tempati serta status administrasi, serta secara fisik mereka tinggal dalam kondisi yang sangat buruk tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar lingkung hunian, sering terkena banjir serta polusi lingkungan lainnya. Pertumbuhan permukiman kumuh (slum dan squatter) ini terasa makin pesat, semenjak, terutama terjadinya krisis yang “menasional”, mulai dari krisis moneter, disusul krisis ekonomi sampai krisis multidimensi yang mengakibatkan bertambah besarnya jumlah penduduk miskin baik dipedesaan

maupun diperkotaan, kondisi ini telah menyebabkan semakin merebaklah kawasan-kawasan slum dan squatter di wilayah perkotaan (Pustri L.D., 2017).

Hal itu terjadi karena banyak penduduk kota yang menurun tingkat kesejahteraannya, senantiasa pendatang dari pedesaan yang membawa banyak penduduk miskin juga meningkat. Dari kondisi tersebut diatas jelas terlihat bahwa permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) merupakan buah dari berbagai situasi rumit dari ketimpangan pembangunan yang perlu digali akar persoalannya dan dicari kemungkinan pemecahan yang realistic yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota, dan fenomena keberadaan masyarakat slum dan squatter diperkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidak jelasan fungsi elemen-elemen lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas permukiman perkotaan, sehinggah wajah kota tidak jelas, keberadaan kawasan kumuh akan memberikan dampak negative baik ditinjau dari sisi kelayakan kawasan maupun keterjaminan kualitas hidup dan berkelanjutan fungsi lingkungan (Fadjarani & Ruli As'ari, 2018).

2.1.3 Faktor Penyebab Munculnya Kawasan Kumuh

Sejalan dengan perkembangan baik secara fisik, ekonomi dan sosial budaya, kota telah mengalami pergeseran peran, mulai dari pradigma bahwa kota telah berkembang dengan berbagai konflik kepentingan, kemudian muncul pradigma bahwa kota berkembang sebagai proses ekologi budaya, sampai dengan munculnya pandangan bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya berbagai komunitas dan budaya dengan istilah "*social world*", sebagaimana diungkapkan oleh Howard

becker (1970an, dari Herbert Gans, 1992; Ernest Burgess, 1925, the Chicago School): yang memandang bahwa semuanya kehidupan dikota merupakan produk dari kebudayaan-kebudayaan yang tercipta oleh dunia sosial yang hidup dikota tersebut.

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi dipedesaan telah mendorong sebagian besar warga pedesaan untuk mengadu nasib diperkotaan (Sakdiah & Rahmawati, 2021). Perkembangan kota yang pesat tersebut berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang keperkotaan dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga mengakibatkan kurang perhatiannya terhadap pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada kenyataanya mengakibatkan :

1. Terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak/memadai
2. Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi dikumuh, dan tidak lagi sesuai dengan standar lingkungan permukiman yang sehat.
3. Kurangnya perhatian/partisipasi masyarakat akan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman diperkotaan merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah merupakan asset dalam rangka pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, sedangkan pengadaan perumahan yang dilakukan oleh semua pelaku pada hakekatnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi nasional, oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional. (Herbert Gans, 1992; Ernest Burgess, 1925, the Chicago School)

1. Faktor Ekonomi, sebagian besar masyarakat yang bermukim pada kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah karena terbatasnya akses terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu banyak masyarakat dengan ekonomi rendah bekerja pada sektor informal. Perekonomian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. Apabila pada suatu kawasan memiliki perekonomian rendah maka akan menyebabkan penurunan pada beberapa aspek lainnya. Karena pendapatan masyarakat rendah maka masyarakat kesulitan dalam mendapatkan rumah yang layak huni bagi dirinya dan keluarganya. Secara ekonomis, dengan kondisi perekonomian yang relatif rendah, dimungkinkan kemampuan masyarakat penghuni untuk merealisasikan perbaikan lingkungan huniannya sangatlah tidak mungkin (Padyansari et al.,

2023). Sehingga dengan kemampuannya, mereka mendirikan bangunan guna tempat tinggal dengan kondisi seadanya agar dapat bertahan hidup dikawasan perkotaan. Karena ketidakmampuan masyarakat dalam faktor ekonomi untuk mendapatkan rumah yang layak huni maka menambah permasalahan bagi pemerintah terkait berkembangnya permukiman kumuh dikawasan perkotaan.

2. Faktor geografi dan lingkungan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan lokasi dan ketersediaan lahan, yang mana saat ini lahan perkotaan khususnya dengan peruntukkan lahan sebagai lahan perumahan semakin sulit untuk didapatkan. Sehingga golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah semakin sulit memperoleh lahan di kawasan perkotaan karena terjadi spekulasi lahan, kepemilikan lahan yang didominasi oleh golongan tertentu, aspek hukum kepemilikan, dan ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah (Padyansari et al., 2023). Hal ini yang menyebabkan masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah dengan kemampuannya, mereka mendirikan bangunan guna tempat tinggal dengan kondisi seadanya dengan keadaan dibawah standar pada permukiman yang tidak layak agar dapat bertahan hidup.
3. Faktor Psikologi, manusia dan lingkungan sejatinya akan selalu melakukan interaksi antara satu sama lain, karena sudah menjadi keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi yang terjadi dapat berupa saling menolong ataupun saling menguasai. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membuat manusia saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terciptalah suatu kelompok yang didasari dari satu rumah dengan rumah lainnya yang kemudian disebut sebagai permukiman (Sari & Ridlo, 2022). Masyarakat Indonesia

identik memiliki sifat dengan berbagai norma-norma sosial yang melekat pada masing-masing individu. Tak terkecuali pada lingkungan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Adanya perbedaan ini sering terjadi kesalahpahaman diantara masing-masing individu. Tidak jarang terjadi jika antar individu dalam suatu kawasan permukiman memiliki rasa tidak percaya satu sama lain. Masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu permasalahan. Karena yang dipikirkan hanyalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam lingkungan tersebut.

4. Faktor Fisik Lingkungan, perkembangan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada umumnya karena faktor fisik lingkungan yang tidak memadai. Faktor fisik lingkungan ini meliputi sistem drainase, sistem persampahan, kondisi tanah dan bangunan, serta jaringan-jaringan lainnya yang sejak awal sebelum berkembangnya permukiman kumuh sudah menjadi suatu permasalahan yang ada di suatu kawasan. faktor utama yang menyebabkan kekumuhan adalah kualitas bangunan, hal ini disebabkan jika umur bangunan sudah tua maka kualitas bangunan akan ikut menurun, selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas material bangunan tersebut (Wahyu Saputra et al., 2022). Seiring berjalannya waktu, permukiman disekitar kawasan tersebut juga akan terdampak. Apabila tidak dilakukan pengendalian maka akan mengakibatkan kondisi kawasan tersebut semakin memburuk. Perkembangan kawasan permukiman kumuh tidak dapat dicegah dan tidak dapat dihindari dalam perkembangan kawasan perkotaan. Karena kawasan permukiman kumuh telah menjadi bagian dari struktur ruang kota.

2.1.4 Kriteria atau Indikator Kawasan

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, (2022). Dalam buku Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh Kegiatan Kotaku terdapat 7 (tujuh) kriteria atau indikator kawasan kumuh sebagai berikut:

2.1.4.1 Aspek Bangunan Gedung

Aspek bangunan gedung memiliki kriteria dan indikator sebagai berikut :

1. Ketidakberaturan bangunan, indikator :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
2. Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang
 - a. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;
 - b. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha dan untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

- a. Pengendalian dampak lingkungan
- b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
- c. Kesehatan bangunan gedung
- d. Kenyamanan bangunan gedung
- e. Kemudahan Bangunan Gedung

2.1.4.2 Aspek Jalan Lingkungan

1. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan), indikator : Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
2. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk, indikator : Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman

2.1.4.3 Aspek Penyediaan Air Minum

1. Akses aman air minum tidak tersedia, indikator : Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
2. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi, indikator : Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

2.1.4.4 Aspek Drainase Lingkungan

1. Drainase lingkungan tidak tersedia, indikator : Saluran tersier dan/atau

saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

2. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, indikator : Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
3. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, indikator : Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan

2.1.4.5 Aspek Pengelolaan Air Limbah

1. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, indikator : Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
2. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:
 - a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;
 - b. tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat

2.1.4.6 Aspek Pengelolaan Persampahan

1. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis, indikator : Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, indikator : Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan;
 - d. pengelolaan lingkungan

2.1.4.7 Aspek Proteksi Kebakaran

1. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia, indikator : Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
 - a. pasokan air;
 - b. jalan lingkungan;
4. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia, indikator : Tidak tersedianya sarana

proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan

Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.

2.1.5 Teori Penyusunan kawasan

Johan silas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemukiman kumuh adalah:

1. Kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.
2. Kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh, yang menjadi penyebabnya mobilitas social ekonomi yang stagnan.
3. Dalam tulisannya disurabaya, pembangunan dan kehadiran dan pemukiman kumuh, johan silas menjelaskan tentang kriteria pokok pemukiman kumuh /marginal:
 - a. Berada dilokasi yang tidak legal
 - b. Keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah
 - c. Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota

d. Tidak diingini kehadirannya oleh umum, (kecuali yang berkepentingan)

Lebih lanjut johan silas menegaskan, pemukiman marjinal selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal); ada system angkutan yang memadai dapat dimanfaatkan secara mudah walau tidak selalu murah.

e. David satterwhaite menyatakan bahwa pemukiman marjinal tidak sah dalam dua hal, yaitu pertama, tanah dihuni secara tidak sah, dan kedua, site serta bangunan dibangun dan dikembangkan secara tidak sah berlawanan dengan tata guna lahan (zoning).

Secara umum, pemukiman marjinal dikelompokkan menjadi empat (4) tipe besar, secara sekuensial terdiri atas:

1. Keadannya cukup baik dan berpeluang diresmikan (dilegalkan).
2. Keadannya sudah baik, tetapi ada kesulitan untuk menjadi resmi, walaupun bukan harga mati.
3. Keadaannya amat terbatas dan tidak berpeluang untuk diadakan pengembangan lebih lanjut.
4. Keadannya sangat darurat, baik tetap maupun mobile.

2.1.6 Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah yang terdapat kawasan permukiman, perkantoran serta digunakan sebagai pemusatan segala aktivitas atau kegiatan baik pelayanan dan jasa, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, maupun pusat kegiatan pemerintahan. Wilayah kota merupakan pusat dari jasa distribusi atau disebut sebagai growth centre (Adisasmita, 1989). Berdasarkan pernyataan tersebut

kota akan mengalami pertumbuhan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Pada kawasan perkotaan, kegiatan pertanian bukanlah menjadi kegiatan utamanya. Banyaknya aktivitas yang dilakukan di kawasan perkotaan mengakibatkan intensitas penggunaan lahannya cukup tinggi. Seiring berjalannya waktu kawasan perkotaan akan terus berkembang dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat. Sehingga secara perlahan kawasan perkotaan akan selalu mengalami perubahan baik dalam kondisi fisik lingkungan ataupun kondisi sosialnya. Perkembangan kawasan perkotaan apabila tidak diarahkan dan direncanakan sedini mungkin, maka akan menyebabkan berbagai permasalahan pada lingkungan tersebut.

2.1.7 Kampung Kota

Kampung Kota secara umum diketahui sebagai suatu pemukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota (Nursyahbani & Pigawati, 2015). Pada umumnya kampung kota ini didomisili oleh masyarakat pendatang yang kemudian mendirikan tempat tinggal saling berdekatan dalam suatu kawasan. Kondisi kampung kota biasanya memiliki ketidakteraturan bangunan, karena pada saat mendirikan bangunan tersebut masyarakat kurang memperhatikan kondisi fisik lingkungan serta aspek pendukung lainnya.

2.1.8 Pedoman Penilaian Kawasan Kumuh Berdasarkan Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh

Pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian Kawasan kumuh telah disusun secara sistematis di dalam buku saku penilaian Kawasan kumuh sesuai

indikator program KOTAKU. Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh disusun berlandaskan dan merujuk pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasikan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR di lokasi permukiman kumuh. Kegiatan KOTAKU dilaksanakan dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Identifikasi dan penilaian kawasan kumuh ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui survei pada perumahan dan permukiman kumuh dan penyusunan format numerik serta penyusunan skenario penanganan kumuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan dalam pencapaian target kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Secara umum, tujuan dari kegiatan identifikasi dan penilaian lokasi kumuh yaitu untuk mendapatkan titik lokasi dan jenis infrastruktur prioritas penanganan kumuh yang tepat sasaran dan sesuai indikator keberhasilan kinerja KOTAKU.

1. Aspek dan Kriteria Kekumuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan.

Tabel 2. 1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan

ASPEK (7)	KRITERIA (16)
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat Kepadatan Bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air	Ketersediaan Akses Aman Air Minum

Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	Ketidaksediaan Drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 2 Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Indikator
A. Aspek Bangunan Gedung		
1	Ketidakteraturan Bangunan	a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
2	Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi yang Tidak Sesuai Dengan	a. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; b. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: • untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha
	Ketentuan Rencana Tata Ruang	• untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	a. Pengendalian dampak lingkungan b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum c. Kesehatan bangunan gedung d. Kenyamanan bangunan gedung e. Kemudahan Bangunan Gedung
B. Aspek Jalan Lingkungan		
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan)	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman

C. Aspek Penyediaan Air Minum		
1	Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
D. Aspek Drainase Lingkungan		
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
E. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi		
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;
	Memenuhi persyaratan teknis	b. tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat
F. Aspek Pengelolaan Persampahan		
1	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan

	dengan persyaratan teknis	tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; d. pengelolaan lingkungan
G. Aspek Proteksi Kebakaran		
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan;
		3. sarana komunikasi; dan/atau; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan
Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.		

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

2. Persiapan Identifikasi dan Penilaian Kumuh

- Baseline numerik untuk lokasi Kumuh Kota/Kabupaten;
- Berita Acara Pertemuan Warga I yang memuat daftar usulan lokasi rencana penanganan kumuh di kelurahan/desa sasaran;
- SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota/Kabupaten;

- d. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan;
- e. Dokumen RP2KPKP; dan Dokumen pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam proses identifikasi dan penilaian lokasi kumuh..

3. Pelaksanaan Identifikasi dan Penilaian Kumuh

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Fasilitator Masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan Identifikasi dan Penilaian Kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Pokja PKP kota/kabupaten dan Penyelenggara Swakelola untuk melakukan Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh hasil usulan Pertemuan Warga I;
- b. Melakukan analisis data baseline numerik mengenai kondisi 7 (tujuh) kriteria aspek kekumuhan, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran beserta kebutuhan infrastruktur penanganannya. Dalam hal ini, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu apabila lokasi kumuh usulan tidak memiliki data baseline numerik, maka FM dan penyelenggara swakelola melakukan penghitungan baseline numerik dengan instrumen penghitungan yang sesuai dan apabila desa/kelurahan sasaran KOTAKU IBM pernah mendapatkan bantuan penanganan kumuh pada tahun-tahun sebelumnya dan luasan kumuhnya telah dinyatakan 0 (nol) hektar dalam Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota/Kabupaten, maka FM dan

penyelenggara swakelola melakukan penghitungan baseline numerik pada kawasan RT/RW yang belum ditangani.

- c. Melakukan survei lapangan ke lokasi-lokasi hasil usulan pada Pertemuan Warga I untuk meninjau kondisi 7 (tujuh) kriteria aspek kekumuhan dan kondisi infrastruktur eksisting
- d. Menyusun peta delineasi kawasan kumuh
- e. Melakukan pengecekan terkait legalitas tanah yaitu Kejelasan status penguasaan lahan; dan Kesesuaian Rencana Tata Ruang.
- f. Melakukan penilaian terhadap pertimbangan lain: Nilai strategis lokasi; Kependudukan; dan Kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- g. Melakukan penentuan skala prioritas penanganan kumuh berdasarkan hasil penilaian kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain
- h. Melakukan penyusunan: Tabel Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan; Peta Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh; Profil Lokasi Kumuh yang berisi hasil pendataan dan penilaian lokasi (format daftar numerik); dan Daftar jenis infrastruktur yang akan ditangani dan rencana pemenuhan Readiness Criteria.

4. Perhitungan Numerik Kumuh

Sebelum melakukan perhitungan dan input baseline, terdapat beberapa data yang dibutuhkan yang termuat dalam tabel berikut:

Gambar 2. 1 Kebutuhan Data Numerik Kumuh

Provinsi (2)	:		Jumlah KK (7)	:		KK
Kota/Kabupaten (3)	:		Jumlah Penduduk Laki-Laki (8)	:		Jiwa
Kecamatan (4)	:		Jumlah Penduduk Perempuan (9)	:		Jiwa
Kelurahan/Desa (5)	:		Luas Permukiman (11)	:		Ha
RT/RW (6)	:		Jumlah Bangunan (12)	:		Unit

**Data yang diisi merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan*

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
	Jumlah bangunan tidak teratur* (14) <i>*Berada diatas sungai/laut/rawa/danau; berada di daerah buangan limbah pabrik; berada dibawah saluran tegangan tinggi (sutet); tidak memiliki akses langsung ke jalan (terhalang oleh bangunan lain</i>		Unit

	Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai dengan ketentuan* (15) <i>*Kepadatan lebih dari 200-250 unit/Ha</i>		Ha
	Jumlah bangunan hunian tidak memenuhi persyaratan teknis* (16) <i>*Kondisi atap bangunan bocor; lantai bangunan berupa tanah; Kondisi dinding bangunan rusak</i>		Unit

1. ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
	Total panjang jalan lingkungan (lebar > 1,5 m) terbangun / eksisting (17)		m'
	Total panjang jalan lingkungan kondisi ideal (18)		m'
	Total panjang jalan yang dibutuhkan untuk area belum terlayani (19)		m'
	Total panjang jalan kondisi rusak (20)		m'

2. ASPEK KONDISI PELAYANAN AIR MINUM			
	Jumlah KK tidak dapat mengakses air minum aman (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa) (21)		KK
	Jumlah masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60liter/org/hari (22)		KK

3. ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
	Total panjang drainase (23)		m'
	Total panjang drainase kondisi ideal (24)		m'
	Luas Area terjadi genangan/banjir (25)		Ha
	Total panjang drainase yang dibutuhkan untuk area belum terlayani (26)		m'
	Total panjang jaringan drainase kondisi buruk/ tidak berfungsi baik (27)		m'
4. ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan air limbah yang tidak terhubung dengan tangki septik (28) <i>* Buangan limbah rumah tangga menyatu dengan saluran drainase lingkungan; Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik</i>		KK
	Jumlah KK dengan kondisi sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis* (29) <i>* Tidak memiliki jamban sendiri/jamban bersama (5 KK/jamban)</i>		KK
5. ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Jumlah KK dengan kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis* (30) <i>*Tidak memiliki tempat pembuangan sampah pribadi, komunal; Pengelolaan sampah dengan cara dibakar; Tidak memiliki tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan</i>		KK
	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis (31) <i>*Pembuangan sampah dilakukan di ruang terbuka/lahan kosong/jalan/area yang bukan peruntukannya; Pengangkutan sampah ke TPS/TPA kurang dari 1 (satu) kali dalam seminggu</i>		KK
6. ASPEK KONDISI PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN			
	Jumlah bangunan hunian tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran (32) <i>* Tidak memiliki penyediaan pasokan air (bak/kolam penampungan air, sumur dalam/hidran); tidak memiliki Pos Kebakaran Lingkungan dan alat pendukungnya</i>		Unit
	Jumlah bangunan hunian tidak memiliki sarana proteksi (33) <i>*tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</i>		Unit
7. ASPEK LEGALITAS PENDIRIAN BANGUNAN			
	Jumlah bangunan hunian memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) (34)		Unit

	Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (36)		Unit
8. ASPEK KEPADATAN PENDUDUK			
	Luas wilayah RT (38)		Ha
10 ASPEK MATA PENCAHARIAN PENDUDUK			
	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan (39)		Unit
	Perikanan/nelayan (40)		Unit
	Pertambangan/galian (41)		Unit
	Industri/pabrik (42)		Unit
	Konstruksi/bangunan (43)		Unit
	Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) (44)		Unit
	Pegawai pemerintah (45)		Unit
11 ASPEK PERTIMBANGAN FUNGSI STRATEGIS LOKASI			
	Lokasi "berada" pada fungsi strategis Kabupaten atau Kota (46)	Ya/Tidak	
12 ASPEK POTENSI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA UNTUK DIKEMBANGKAN			
	Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan (48)	Ya/Tidak	

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Rumus Perhitungan Numerik Kumuh adalah membuat baseline untuk masing-masing kriteria per aspek sebagai acuan dalam melakukan penilaian yang sudah disesuaikan dengan rumus dan satuannya. Berikut adalah rincian dari baseline dan rumus perhitungan kriteria kekumuhan:

Gambar 2. Rumusan Perhitungan Numerik Kumuh

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
1. Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	Luas kawasan 200/250 < (unit/ha)	$\frac{\text{luas kawasan 200/250}}{\text{luas kawasan kumuh}} \times 100\%$
Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
2. Kondisi Jalan Lingkungan	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	• Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m)	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
	Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum aman}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
4. Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
	Ketidaksediaan drainase	• Panjang drainase ideal (m) • Panjang drainase existing (m)	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase existing (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
	Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sarpras persampahan tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
	Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis	$\frac{\sum KK \text{ dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100$
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 2 Data Isian Indikator Numerik Kekumuhan

Kawasan	:		Luas SK	:		Ha
Kelurahan	:		Luas	:		Ha
Kecamatan	:		Verifikasi	:		Ha
Kab/Kota	:		Jumlah	:		Unit
Propinsi	:		Bangunan	:		Unit
	:		Jumlah	:		jiwa
	:		Penduduk	:		KK
	:		Jumlah KK	:		KK
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG						
						Numerik
a.	Ketidakteraturan bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan			Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	§	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan			Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis			Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN						
a.		§	Panjang jalan ideal			m'

	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	§	Panjang jalan existing		m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	§	Panjang jalan dengan permukaan rusak		m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM					
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	§	Jumlah KK tidak terakses air minum aman		KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	§	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya		KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN					
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	§	Luas kawasan yang terkena genangan		Ha
b.	Ketidaksediaan Drainase	§	Panjang drainase ideal		m'
		§	Panjang saluran drainase existing		m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	§	Panjang saluran drainase rusak		m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis		KK
b.		§			KK
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis		
ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	§	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis		KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis		KK
ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN					
a.	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran		Unit
b.	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		Unit

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

5. Perhitungan Numerik Kumuh

Gambar 2. 3 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Bangunan Gedung			
1	Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
2	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
		51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
		25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
Aspek Jalan Lingkungan			
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	76% - 100% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	5
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	3
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	1
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	76%-100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
		25% - 50% area memiliki kualiatas permukaan jalan yang buruk	1

Aspek Penyediaan Air Minum			
1	Akses aman air minum tidak tersedia	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3

No	Kriteria	Parameter	Nilai
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
Aspek Drainase Lingkungan			
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	5
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	3
		25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan >2x setahun	1
No	Kriteria	Parameter	Nilai
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
Aspek Pengelolaan Air Limbah			
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
		51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
		25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Pengelolaan Persampahan			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1
Aspek Proteksi Kebakaran			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3

No	Kriteria	Parameter	Nilai
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhajir Syam (2017)	Identifikasi Kawasan Kumuh Dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rongas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene	Tingkat Kekumuhan Di Wilayah Studi Adalah Kumuh Sedang Yang Penyebab Utama Kekumuhan Yaitu Kondisi Kualitas Drainase Yang Tidak Mampu Menampung Aliran Air Limbah Dari Rumah Warga. Berdasarkan Beberapa Pertimbangan Termasuk Tingkat Kekumuhan, Pertimbangan Lain Dan Legalitas Lahan Maka Konsep Penataan Yang Diterapkan Pada Wilayah Studi Adalah Peremajaan
2.	Adit Pratama Setya Nugraha (2019)	Identifikasi Permukiman Kumuh Pada Tingkat Rw Dan Arahan Penanganan Di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Kondisi Kekumuhan Dari Masing Masing RW Disebabkan Oleh Faktor Faktor Yang Hampir Sama. Kekumuhan RW 01 Disebabkan Oleh Keteraturan Bangunan, Jarak Antar Bangunan, Persyaratan Teknis Pengelolaan Persampahan,

			Sistem Pengelolaan Persampahan.
3.	Nor Laely Qomariah Dan Andika Saputra (2020)	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Suku Sawanggantung, Belitung Timur	Aspek Bangunan Gedung Dari Semua Kriteria Mendapatkan Kategori Kumuh Sedang. Aspek Penyediaan Air Minum Di Kriteria Ketidaktersedian Akses Aman Air Minum Mendapat Kategori Baik. Aspek Pengelolaan Air Limbah Dan Aspek Pengelolaan Persampahan Di Semua Kriteria Mendapatkan Kategori Buruk.
4.	Mashuri (2021)	Identifikasi Tingkat Kekukumuhan Kawasan Pemukiman Teratak Buluh Kabupaten Kampar	Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan Dapat Disimpulkan Bahwa Kawasan Pemukiman Teratak Buluh Termasuk Dalam Kategori Tingkatan Kumuh Ringan. Presentase Tertinggi Terkait Dengan Permasalahan Kumuh Kawasan Adalah Kondisi Minim Atau Rendahnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran Dan Kurang Optimalnya Pengelolaan Persampahan Berupa Terbatasnya Fasilitas Sarana Dan Persampahan, Kondisi

			Pengelolaan Yang Tidak Baik Serta Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Persampahan Yang Ada. Sedangkan Permasalahan Pada Aspek Lainnya Terkait Dengan Kriteria Kumuh Yaitu Kondisi Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Dan Air Limbah Memperoleh Hasil Penilaian Dengan Presentase Rendah.
5.	Aini Zulfa, Zahrul Fuady, Dan Putra Rizkiya (2023)	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	Berdasarkan Hasil Analisis, Diketahui Bahwa Tingkat Kekumuhan Permukiman Kawasan Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada saat ini adalah Kumuh Ringan Dengan Total Nilai Akhir 29. Faktor Langsung Ialah Perubahan Aspek Fisik Melalui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Dan Pelayanan: Program Bantuan Perumahan, Penyediaan Jalan Dan Drainase, Serta Penyediaan MCK Umum. Kemudian Faktor Tidak Langsung Ialah Aspek Ekonomi Melalui Upaya Peningkatan Ekonomi

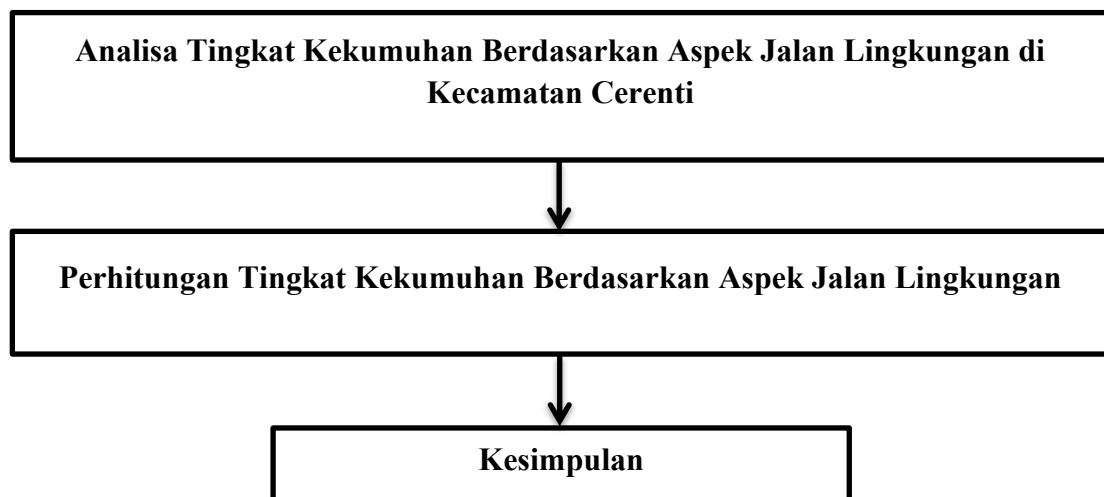
			Masyarakat Dibidang Pertanian Kopi Dan Sosial Budaya Melalui Peningkatan Kesadaran Dan Kebiasaan Masyarakat.
--	--	--	--

Sumber: Review Penelitian Terdahulu, 2025.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka diperoleh prediksi hubungan antar variabel seperti dibawah ini:

Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran



Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu kegiatan penelitian yang lebih terinci, Nassir (1988:51-52). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau objek penelitian dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis mendalam atau membuat kesimpulan umum.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari hingga Juli 2025 atau setelah keluarnya surat penelitian dari Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Wilayah yang dijadikan studi penelitian ini adalah di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada observasi objek penelitian yang memiliki masalah banyaknya drainase yang tidak berfungsi, masalah pengolahan limbah yang kurang baik, jalan lingkungan yang alih fungsi dan masalah sampah yang kurang teratasi dengan baik, sehingga mengganggu kenyamanan warga yang bermukim di lokasi tersebut.

Tabel 3. 1 Matrik Penyusunan Skripsi

Kegiatan	Tahun									
	2024		2025							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Pengajuan Judul										
Penerbitan SK										
Penyusunan proposal										
Seminar proposal										
Revisi proposal										
Pengumpulan Data										
Penyusunan Hasil Penelitian										
Seminar Hasil										
Sidang Skripsi										

Sumber : Olahan deskripsi Peneliti, 2025

3.3 Sumber Data

Penelitian dilakukan berdasarkan data yang diperlukan yakni data primer dan data skunder :

1. Data primer yaitu yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara yang berbentuk catatan atau laporan dan dokumen lainnya. Data yang akan di cari oleh peneliti yaitu data jalan lingkungan, drainase, pengolahan air limbah, persampahan, jumlah penduduk dan luas kawasan Kecamatan Cerenti.

3.4 Variabel dan Indikator

Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, variabel penelitian adalah hal-hal yang akan kita teliti.

Indikator adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebuah indikator tidak selalu menggambarkan keadaan secara keseluruhan tetapi seringkali hanya memberi petunjuk tentang keadaan keseluruhan tersebut. Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai Analisa Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Jalan Lingkungan di Kecamatan Cerenti. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator Analisa Kawasan Kumuh

Variabel		Indikator
Jalan lingkungan	a.	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
	b.	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang akurat. Menurut Iwan Pranoto dkk (2023), observasi melibatkan penggunaan lima panca indera dan merupakan teknik yang efektif untuk mempelajari suatu sistem. Selain itu, observasi juga mencakup pengamatan yang sistematis dan terstruktur, dimana hasilnya dicatat secara rinci untuk analisis lebih lanjut. Metode ini penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid dan relevan (Pranoto et al., 2023). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti (Husain Usman, 1995:54). Selain pengertian ini secara luas Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, akan tetapi dalam penelitian ini observasi diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan panca indera penglihatan yang berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Irwan Suharto,1999:69).

Adapun yang akan diobservasi yaitu fenomena kawasan kumuh di Kecamatan Cerenti yang meliputi drainase dan air limbah.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Metode wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yakni kalimat tidak hanya pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian akan tetapi dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan.

sebagai narasumber untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap tentang obyek yang akan diteliti. Alasan peneliti memilih metode ini supaya peneliti mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Cerenti untuk data analisa kawasan kumuh yaitu Desa Koto Praku dan Kelurahan Pasar Cerenti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari berbagai catatan, gambar dan benda-benda yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun yang dibutuhkan untuk dokumentasi adalah peta Kecamatan Cerenti, drainase, jalan lingkungan, bak sampah, dan pembuangan limbah serta kondisi bangunan yang berada di kawasan kumuh Kecamatan Cerenti untuk data analisa kawasan kumuh yaitu Desa Koto Praku dan Kelurahan Pasar Cerenti.

Metode dokumentasi ini berfungsi untuk dapat memperoleh data tentang gambaran secara jelas mengenai kawasan kumuh di Kecamatan Cerenti.

3.5.4 Angket atau kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis:2008:66) penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaan dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda dan pertanyaan terbuka. Kuisisioner dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 49.

3.6 Teknik Analisa Data

a. Perhitungan Numerik Kumuh

- Total panjang jalan lingkungan (Lebar > 1,5 M) terbangun/eksisting (M)
- Total panjang jalan lingkungan kondisi ideal (M)
- Total panjang jalan yang dibutuhkan untuk area belum terlayani (M)
- Total panjang jalan kondisi rusak (M)

b. Rumus perhitungan numerik kumuh (untuk membuat baseline)

Kriteria	Baseline	Rumus
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang Jalan Ideal (M) • Panjang Jalan Existing (M)	$\frac{\text{Panjang Jalan Ideal (M)} - \text{Panjang Jalan Existing (M)}}{\text{Panjang Jalan Ideal (M)}} \times 100\%$
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	• Panjang Jalan Rusak	$\frac{\text{Panjang Jalan Rusak}}{\text{Panjang Jalan Ideal}} \times 100\%$

c. Data isian indikator numerik kekumuhan

Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Ideal	M
	Panjang Jalan Existing	M
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan dengan Permukaan Rusak	M

d. Perhitungan Tingkat Kekumuhan

a) Kriteria jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, parameter :

- 1) 76%-100% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan, bobot : 5
- 2) 51%-75% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan, bobot : 3
- 3) 25%-50% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan, bobot : 1

b) Kualitas permukiman jalan lingkungan yang buruk, parameter :

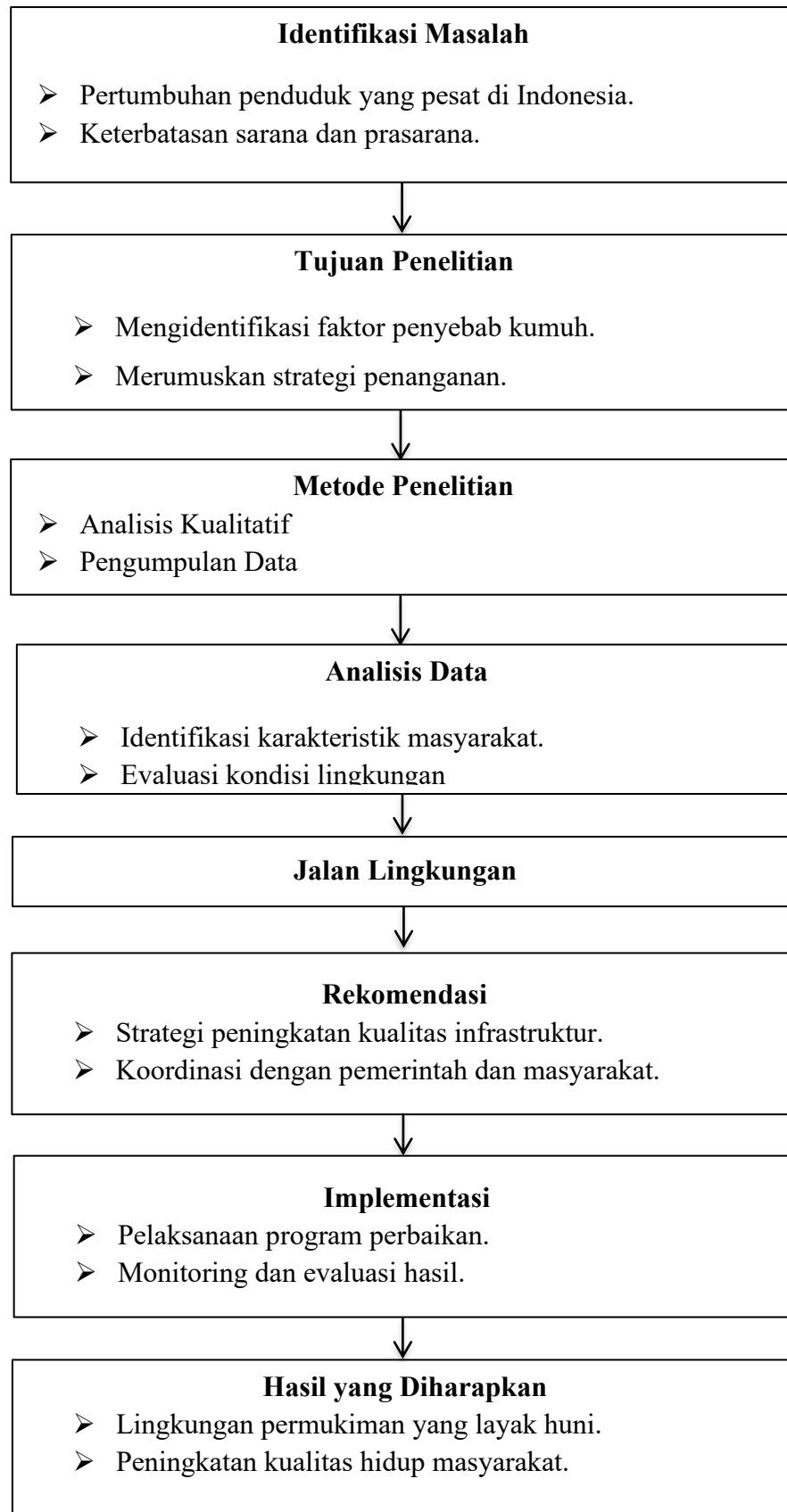
- 1) 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk, bobot : 5
- 2) 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk, bobot : 3
- 3) 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk, bobot : 1

e. Keterangan Rumus Perhitungan Kumuh

a) Jalan ideal : jalan yang kondisinya baik dengan lebar jalan memadai untuk dilewati kendaraan dan pejalan kaki, jalan rata, tidak berlubang, bebas genangan air dan drainase yang berfungsi dengan baik. Jalan ideal merupakan kondisi yang dicita-citakan dan menjadi standar untuk perbaikan.

b) Jalan Existing : total keseluruhan jalan yang sudah ada memiliki kontribusi nyata di lapangan yang menjadi dasar untuk perencanaan dan penilaian.

3.7 Diagram Alir Penelitian



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Cakupan pelayanan jalan lingkungan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti sudah memadai terhadap luas area artinya sebagian besar lokasi sudah terlayani jalan lingkungan.
2. Kondisi kualitas jalan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti secara keseluruhan sudah memadai, tinggal 25% jalan berkualitas buruk yang terdapat di Kelurahan Pasar Cerenti.
3. Tingkat kekumuhan berdasarkan aspek jalan lingkungan, kawasan Kelurahan Pasar Cerenti berada pada tingkat kumuh rendah dan Desa Koto Praku Kecamatan Cerenti sudah bukan kawasan kumuh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan secara swadaya dapat terlibat langsung dalam perawatan dan perbaikan kecil terhadap jalan lingkungan.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses yang sesuai dengan standar yang ditentukan untuk pencegahan dan penanganan kerusakan jalan lingkungan di Kecamatan Cerenti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Eka Dahlan Uar. (2016). *Strategi Penanganan Kumuh*. 8, 127–144.
- Fernando Nadyana Yustika, E. U. (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Pemukiman Kumuh di Kelurahan Kalirasi Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya*. 8(2), 189–193.
- HARAHAP, A. R. (2019). Potret Masyarakat Di Permukiman Kumuh (Slum Area) (Studi di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung).
- Hasmar, Halim, H.A.2012, *Drainase Terapan*, UIIPress, Yogyakarta
- Joenso, C., & Sari, S. R. (2020). *Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus Permukiman Lampu Satu ,.*
- Julianto, H., & Jumario, N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kota Tarakan. *Potensi : Jurnal Sipil Politeknik*, 19(2), 65–74. <https://doi.org/10.35313/potensi.v19i2.897>
- Lusi Dwi Pustri. (2017). *Pelatihan Perencanaan Partisipatif Dalam Penataan Kawasan Kumuh Meranti Kota Pekanbaru*.
- Padyansari, R., Rahayu, M. J., & Suminar, L. (2023). Karakteristik dan Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas. *Desa-Kota*, 5(2), 100.
- Pigawati, R. N. B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(2), 267–281.
- Rina Farida 2016 dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP)
- Setiadi, A. (2017). *Pola Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Winongo*. SEMINAR NASIONAL-1 BMPTTSSI - KoNTekS 5, 1.
- Syam, M. (2017). *Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Pemukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. 164.

Skripsi dan Jurnal :

- Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 2–6. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24173>
- Fadjarani, S., & Ruli As'ari. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15 (1), 5667. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Handayani, I. (2017). *Tinjauan Peran Jalan Lingkungan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh*. *Jurnal Arsitektur*, 10(2), 78-89.
- Mashuri. 2021. *Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Pemukiman Teratak Buluh Kabupaten Kampar*. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau.
- Nugraha, Adit Pratama Setya. 2019. *Identifikasi Permukiman Kumuh Pada Tingkat Rw Dan Arahan Penanganan Di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Pranoto, B. & Indraswari, R. (2019). *Analisis Spasial Tingkat Kekumuhan Kawasan Pesisir Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)*. *Jurnal Geografi Lingkungan*, 2(2), 87-99.
- Pricilia, L. O. N. T. (2021). *Identifikasi Kawasan Dan Masyarakat Permukiman Kumuh Di Aldeia 12 Divino Dan Aldeia Tahu Laran Suco Caicoli Posto Administrativo Vera Cruz Municipio Dili Timor- Leste. 1*.
- Puspitasari, H. & Nurhayati, I. (2018). *Analisis Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Semarang*. *Jurnal Ruang*, 4(1), 1-10.
- Rahardjo, A. & Setyowati, E. (2019). *Pengaruh Kondisi Fisik Jalan Lingkungan terhadap Tingkat Kekumuhan di Kawasan Permukiman*. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 11(2), 123-135.
- Qomariah, Nor laely dan Andika Saputra. 2020. *Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Suku Sawanggantung, Belitung Timur*. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh*

- Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56280>
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Setyorini, D. & Wibisono, Y. (2017). *Identifikasi dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Indikator Permukiman Kumuh di Kota Surabaya*. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 25-34.
- Siregar, M. & Arifin, A. (2021). *Model Penilaian Kekumuhan Permukiman Berbasis Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Perkotaan*, 13(1), 56-68.
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74–94. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1617>
- Syam, Muhajir. 2017. *Identifikasi Kawasan Kumuh Dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.
- Utomo, B. & Prasetyo, D. (2021). *Identifikasi Faktor Penyebab Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan di Wilayah Perkotaan*. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 45-55.
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 12–17.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>

- Wimardana, A. S. (2016). *Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 3–8.
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18386>
- Wulandari, R. & Lestari, S. (2020). *Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan Lingkungan sebagai Indikator Kekumuhan di Kecamatan Sukajadi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(3), 250-265.
- Zulfa, Aini. 2023. *Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kelurahan Pasar Cerenti Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.*

Peraturan Perundang-Undangan :

- Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Kawasan Kumuh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tahun 2022
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) permen no 2 tahun 2016 tentang kumuh
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2022). *Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh Kegiatan Kotaku*. 1–65.
<https://ibmpkp.pu.go.id/>

Website :

- <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i2.72271.100-111>
- <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4636/>
- <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KUISIONER PENELITIAN

ANALISA TINGKAT KEKUMUHAN BERDASARKAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN CERENTI

Struktur Kuesioner (Mashuri, 2021) :

***Coret yang tidak diperlukan**

1. Informasi Umum Responden

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

2. Bagaimana cakupan pelayanan jalan lingkungan Kelurahan Pasar Cerenti/ Desa Koto Praku?

3. Kondisi Jalan Lingkungan

- f. Apakah jalan lingkungan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti/ Desa Koto Praku terbangun dengan baik ?

—
—
b. Jika tidak, sebutkan panjang jalan yang belum terbangun (dalam meter) :

—
—
—

c. Bagaimana kualitas permukaan jalan di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti/
Desa Koto Praku?

—
—
—
—
—
—

d. Bagaimana kondisi Drainase di kawasan Kelurahan Pasar Cerenti/ Desa
Koto Praku?

—
—
—
—
—

4. Saran dan Masukan

—
—
—
—
—
—
—

LAMPIRAN 2. SURAT RISET

LAMPIRAN 3. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN 4. FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

1. CAMAT CERENTI



2. RW 01 KELURAHAN PASAR CERENTI



3. LURAH PASAR CERENTI



4. KETUA PEMUDA PASAR CERENTI



5. KEPALA DESA KOTO PRAKU



6. STAFF DESA KOTO PRAKU



LAMPIRAN 5. FOTO JALAN KELURAHAN PASAR CERENTI















LAMPIRAN 6. JALAN DESA KOTO PRAKU







KOD		DESKR		Jumlah		LITAS		ROCK AWAR BRUAH				LIMBAH				MERSINGGUL				DAYANG				KIRAH				POKOK AWAR BRUAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1																	

Lampiran 5

LAMPIRAN 8. BIODATA PENULIS

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Nisfu Nur Rahmayani
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Cerenti, 22 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Pasar Cerenti. Kecamatan Cerenti
Nomor HP : +6282283047817
Alamat E-mail : nisfunurrahmayani@gmail.com

Foto

3x4

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2008-2015 : SD Negeri 001 Cerenti
 - b. 2015-2018 : MTs Muhammadiyah Cerenti
 - c. 2018-2021 : SMA Negeri 1 Cerenti
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pelatihan Ilmu Ukur Tanah Dengan Kualifikasi/ Kompetensi Pemetaan Tingkat Dasar Menggunakan Drone
 - b. Pelatihan Gambar Teknik Dengan Kualifikasi/ Kompetensi Menggunakan Aplikasi AUTOCAD
 - c. Seminar Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi
 - d. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)

Riwayat Prestasi

1. Prestasi Akademik
 - a. SD : Selalu Masuk Peringkat 10 Besar
 - b. MTs : Selalu Masuk Peringkat 10 Besar

Pengalaman

1. Magang di [Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi](#)

Riwayat Organisasi

1. MTs (Pengurus IPM)
2. SMA (Pengurus MPK)
3. Himpunan Mahasiswa PWK

Teluk Kuantan, 15 Agustus 2025

NISFU NUR RAHMAYANI
NPM. 210205003